

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KEPEMILIKAN
PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN INDONESIA**

Jason Husin

jasonhusin20@gmail.com

Dewi Sri

dewi_sri@ukmc.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik terhadap kebijakan dividen dengan berfokus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian pada tahun 2018-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dan diperoleh 39 sampel yang terdiri dari 13 perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Publik tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of institutional ownership, managerial ownership, and public ownership on dividend policy by focusing on banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange with a research period of 2018-2020. The data used in this research is secondary data. The population in this study are banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique used was purposive sampling method and obtained 39 samples consisting of 13 companies. Hypothesis testing is done by multiple linear regression analysis. The results of hypothesis testing in this study indicate that Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Public Ownership has no effect on dividend policy.

Keywords : Institutional Ownership, Managerial Ownership, Public Ownership.

PENDAHULUAN

Di era yang modern sekarang ini, dibutuhkan lebih banyak uang untuk bertahan hidup di masa depan. Salah satunya dengan investasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam ilmu ekonomi, *investasi* diartikan sebagai penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu selama jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pengembalian yang lebih baik di masa yang akan datang. Tujuan berinvestasi saham di sebuah atau beberapa perusahaan adalah untuk memperoleh pengembalian investasi (dividen) dan selisih antara harga jual saham dengan harga beli (*capital gain*).

Pada umumnya perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan dividen. Jika perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba ditahan dan selanjutnya mengurangi total pendanaan internal. Sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk mempertahankan laba yang diperoleh, kemungkinan terjadinya akumulasi dana akan semakin besar. Dengan demikian, dividen pada dasarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan dibagikan kepada pemegang saham (Martono & Harjito, 2014:270).

Untuk itu, banyak investor yang ingin memperolehnya harus rela memiliki atau menahan saham yang dibelinya dalam waktu satu tahun. Hal ini didasarkan pada kewajiban perusahaan publik untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunan, salah satunya kewajiban untuk membagikan dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga dapat dijadikan keperluan untuk review dalam membeli saham di suatu perusahaan di masa yang akan datang. Sesuai dengan fenomena yang ada, terdapat fenomena mengenai kebijakan dividen pada perusahaan sektor perbankan.

Fenomena yang dialami oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI) yang mengalami penurunan menjadi 78,7%, dimana laba bersih BNI pada tahun 2019 mencapai Rp15,38 triliun sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp3,28 triliun. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BNI, memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp820,1 Miliar atau setara 25% dari laba bersih tahun 2020. Adapun pada tahun 2019, BNI membagikan dividen sebesar Rp 3,85 triliun atau 25% dari laba bersih dari tahun 2019. Manajemen BNI mengatakan, penurunan ini merupakan bagian dari upaya perseroan untuk memperkuat fundamental keuangan dengan cara melakukan pembentukan pencadangan yang lebih konservatif. Dan juga berbagai langkah, strategi dan kebijakan telah diambil untuk tetap efisien di tengah kondisi yang cukup sulit ini. Berkaitan dengan itu, manajemen merekomendasikan agar pemegang saham mendukung penuh berbagai kebijakan strategis yang dimulai tahun ini untuk menghadapi tantangan dan dinamika bisnis yang terus berjalan. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat terjadi munculnya konflik keagenan.

Konflik keagenan muncul karena manajemen dan pemegang saham memiliki kepentingan masing-masing. Dalam manajemen keuangan konflik keagenan yang sering muncul adalah antara pemegang saham dan manajemen serta antara pemegang saham dengan kreditur. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mengenai struktur kepemilikan antara manajer dengan pemegang saham.

Dalam penelitian ini, kebijakan dividen perusahaan akan dilihat melalui komponen struktur kepemilikan atau pemegang saham. Struktur kepemilikan atau pemegang saham dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik. Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan, kepemilikan institusional adalah saham yang dimiliki oleh pemerintah atau pihak institusi, dan kepemilikan publik adalah saham yang dimiliki oleh pihak publik dan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hendra dan Hairul Anam, 2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Pujiati, 2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Semakin besar kepemilikan saham institusional maka kebijakan dividen yang ditetapkan semakin besar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sintyawati dan Made, 2018) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial menunjukkan pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2018) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sairin, 2018) menunjukkan bahwa kepemilikan publik menunjukkan pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Sejalan dengan hasil penelitian dari (Sairin, 2018), penelitian dari (Hadi dan Kurniawan, 2020) menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan hasil penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dalam perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji kebijakan dividen dalam perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu atau lebih orang mempekerjakan orang lain untuk memberikan layanan dan kemudian mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen dengan asumsi bahwa setiap individu dimotivasi oleh kepentingan masing-masing, karena hal ini dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen.

Di Antara prinsipal dan agen, investor lebih memilih hubungan keagenan karena agenlah yang mengelola bisnis sehingga lebih mengetahui situasi bisnis yang sebenarnya, sedangkan prinsipal hanya

pemilik perusahaan menerima laporan dari manajemen. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pemilik dan agen tentang keadaan perusahaan dikenal sebagai asimetri informasi.

Asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan diasumsikan oleh teori keagenan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Secara etis, agen memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan pemilik, tetapi di sisi lain, agen juga tertarik untuk memaksimalkan kebahagiaan mereka sendiri. Ini mendorong agen untuk mengubah penyajian informasi kepada pemilik bisnis sehingga agen terlihat bekerja dengan baik dan menerima bonus jika menyangkut kepentingan pribadi mereka.

Menghadapi masalah ini, kebijakan dividen bisa menjadi alat yang dapat memecahkan masalah yang muncul di antara pemegang saham dan manajer perusahaan mengenai pembagian dividen perusahaan. Dimana, kebijakan dividen adalah pertimbangan atau keputusan perusahaan bahwa memperoleh laba dengan membagikan laba sebagai dividen kepada investor atau sebagai laba ditahan.

Selain itu, struktur kepemilikan usaha juga dapat meminimalisir masalah keagenan yang muncul. Seorang manajer perusahaan yang juga merupakan pemegang saham perusahaan akan beroperasi dalam arah yang sama tergantung pada kepentingan pemegang saham. Manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena merasa ikut bertanggung jawab atas segala risiko yang muncul.

Menurut Sutrisno (2003), kebijakan dividen adalah kebijakan yang berkaitan dengan pembayaran dividen oleh perusahaan, berupa penetapan jumlah dividen yang akan dibagikan dan jumlah laba ditahan untuk kepentingan perusahaan.

Dalam akuntansi, dividen adalah keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari keuntungan perusahaan selama menjalankan bisnis selama satu periode. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua keuntungan perusahaan dibagikan sebagai dividen, yang sebagian kemudian digunakan kembali oleh perusahaan sebagai modal ekspansi untuk memperluas bisnis dan membuka cabang.

Biasanya, perusahaan memiliki beberapa standar dalam hal pembayaran dividen. Besarnya pembayaran diputuskan oleh para pemegang saham pada saat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk dividen tunai, dividen saham, dividen properti, dividen skrip, dan dividen likuidasi.

Dividen Tunai (*Cash Dividend*) adalah metode pembagian keuntungan yang paling umum. Dibayar tunai dan dikenakan pajak pada tahun penerbitan. Perusahaan publik biasanya membayar dividen ini dua sampai empat kali setahun, dan dividen ini umumnya dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat dividen diterbitkan.

Dividen Saham (*Stock Dividend*) adalah dibayarkan dalam bentuk saham tambahan, biasanya dihitung secara proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Metode ini mirip dengan pemecahan saham karena melibatkan peningkatan jumlah saham sekaligus penurunan nilai setiap saham agar tidak mengubah kapitalisasi pasar. Dengan demikian, pemegang saham akan menerima lebih banyak saham setelah menerima dividen dengan saham tersebut.

Dividen Properti (*Property Dividend*) adalah dibayarkan dalam bentuk aset. Pembagian dividen dengan cara ini jarang dilakukan. Pembagian dividen jenis ini jarang dilakukan oleh perusahaan karena sulit untuk dihitung. Perusahaan yang membayar dividen di *real estate* sering melakukannya karena kas perusahaan telah diinvestasikan di perusahaan lain.

Dividen Skrip (*Script Dividend*) adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang. Perusahaan akan membayarkan dividen ini pada waktu dan jumlah yang ditentukan dalam perjanjian utang. Selain itu, wesel ini akan dikenakan bunga sampai uang tersebut dilunasi kepada pemegang saham. Dividen ini digunakan sebagai akibat dari pengurangan jumlah kas di perusahaan, yang akan mengakibatkan hutang jangka pendek kepada pemegang saham.

Dividen Likuidasi (*Liquidating Dividend*) adalah diartikan sebagai bentuk pengembalian modal. Perusahaan akan mengeluarkan dividen likuidasi jika sisa aset masih sedikit, sebaliknya jika tidak ada sisa aset, pemegang saham tidak akan menerima dividen.

Menurut Eugene dan Houston (2004), ada beberapa teori kebijakan dividen diantaranya yaitu Dividend Irrelevance Theory. Dalam teori ini menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan atau biaya modalnya. Peningkatan pembayaran dividen hanya dimungkinkan jika laba yang diperoleh perusahaan juga meningkat. Keuntungan dari kenaikan harga saham karena pembayaran dividen akan diimbangi dengan penurunan harga saham karena penjualan saham baru. Untuk alasan ini, pemegang saham dapat menerima uang dari perusahaan yang ada sebagai dividen atau menerimanya sebagai keuntungan modal. Dan kekayaan pemegang saham tidak terpengaruh oleh kebijakan dividen saat ini atau masa depan.

The Bird in Hand Theory adalah teori ini menyatakan bahwa investor merasa lebih aman menerima pendapatan dalam bentuk dividen daripada menunggu keuntungan modal. Dividen lebih baik daripada laba ditahan karena pada akhirnya laba ditahan mungkin tidak akan pernah berubah menjadi dividen di masa depan. Biaya ekuitas akan meningkat jika dividen dikurangi, karena pemegang saham akan membayar pengembalian yang lebih tinggi dan akan mempertimbangkan risiko dan kepastian reinvestasi mereka. Di sisi lain, biaya ekuitas menurun karena pembayaran dividen meningkat, karena investor kurang yakin menerima keuntungan modal dari laba ditahan daripada dividen.

Tax Preference Theory adalah teori ini menyatakan bahwa investor ingin perusahaan mempertahankan laba setelah pajak dan menggunakannya untuk membiayai investasi daripada membayar dividen dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan rasio pembagian dividen yang rendah atau tidak membagikan dividen. Karena dividen cenderung dikenakan pajak pada tingkat yang lebih tinggi daripada keuntungan modal, maka investor akan menuntut tingkat pengembalian yang lebih tinggi pada saham dengan imbal hasil tinggi.

Kebijakan dividen dapat membuat manajemen perusahaan menginginkan agar jumlah laba yang tersisa lebih besar daripada pembagian laba berupa dividen kepada pemegang saham. Namun, ini juga menyangkut kesejahteraan pemegang saham. Jika laba ditahan lebih tinggi, jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan berkurang. Sebaliknya, jika pembagian dividen lebih besar dari jumlah laba ditahan, maka akan mengurangi jumlah reinvestasi perusahaan di masa yang akan datang.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah atau lembaga keuangan, badan hukum, badan asing, kepercayaan, dan badan lain yang bernilai substansial. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal atas kinerja manajemen. Pengawasan investor institusional tergantung pada ukuran investasi yang dilakukan.

Pengaruh kepemilikan institusional dalam menjadi pihak pengawas ditekankan pada investasi pasar modal yang besar. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan mengakibatkan investor institusional meningkatkan upaya pengawasan untuk mengurangi perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional menyediakan dana yang akan digunakan untuk modal perusahaan, yang memiliki klasifikasi tertentu dalam menginvestasikan dananya di perusahaan. Untuk mendapatkan kepercayaan organisasi, perusahaan harus memberikan informasi yang andal dan relevan kepada organisasi melalui laporan keuangan. Karena kualitas informasi keuangan yang terjamin, hal itu akan mempengaruhi tingkat pengembalian di masa mendatang.

Kepemilikan manajemen adalah tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, yang terlibat langsung dalam kegiatan operasi perusahaan. Ada persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, yang diukur dengan rasio saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Pengurus perusahaan yang dimaksud adalah direksi dan manajer perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajer dalam perusahaan maka semakin baik kinerja manajemen perusahaan.

Kepemilikan manajerial juga dapat mengurangi konflik keagenan, dimana konflik keagenan muncul karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan akan menyeimbangkan kepentingan mereka sebagai pemilik

saham. Manajer yang memiliki kesempatan sebagai pemegang saham akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena merasa harus menerima konsekuensi dari pengambilan keputusan tersebut.

Menurut Wijayanti (2009), kepemilikan publik adalah proporsi atau jumlah saham yang dimiliki oleh publik atau publik tidak memiliki hubungan khusus dengan perusahaan. Kepemilikan publik memiliki persentase saham yang dimiliki oleh masyarakat umum. Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai usaha, sehingga diperlukan pembiayaan melalui pendanaan internal atau pendanaan eksternal. Sumber pendanaan eksternal diperoleh dari kegiatan publik

Perusahaan publik cenderung lebih ketat dalam mengawasi kegiatannya. Hal ini dikarenakan investor luar membutuhkan kerja keras agar investasi yang mereka lakukan juga dapat menghasilkan pengembalian yang cukup besar. Pemilik publik dapat memiliki informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan bisnis internal. Hal ini dapat mendorong manajer untuk lebih memperhatikan kepentingan pemegang sahamnya.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kebijakan Dividen. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak institusi dalam perusahaan, semakin tinggi kebijakan dividen. Kepemilikan institusional sebagai pemegang saham mayoritas dapat berperan sebagai kontrol dan pengawas terhadap kinerja manajemen perusahaan. Sehingga asimetri informasi dapat diminimalkan dan dapat memenuhi kebutuhan informasi para *stakeholder* agar bisa mengevaluasi kinerja dan memberi nasehat kepada manajemen untuk tindakan kedepannya.

Investor institusional juga biasanya memiliki pendanaan yang besar dan kepemilikannya dapat diukur melalui perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki institusional dengan total keseluruhan saham perusahaan.

Semakin besar kepemilikan institusional atas suatu perusahaan maka kepercayaan terhadap tindakan yang akan diambil para manajer juga akan menjadi semakin tinggi, yang berarti juga para manajer akan semakin sering untuk berkomunikasi dengan para pemegang saham institusional (*stakeholder*) supaya hubungan yang baik berhasil dibangun.

Dalam penelitian (Jurica & Lilyana, 2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada kebijakan dividen sedangkan (Suhartono, 2015) dan (Sumartha, 2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada kebijakan dividen.

Dari penjelasan diatas, peneliti ingin menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional di suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga tingkat kebijakan dividen.

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kebijakan Dividen. Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial yang besar di dalam perusahaan akan efektif untuk mengawasi aktivitas perusahaan.

Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial yang rendah maka insentif yang dikeluarkan untuk memonitor kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan mengalami peningkatan. Pihak manajemen perusahaan harus lebih tegas dalam pengambilan suatu keputusan sebab dalam hal ini manajer merupakan pemilik saham tersebut.

Jika semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen pada suatu perusahaan, maka manajemen perusahaan cenderung lebih giat melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dimana salah satunya adalah dirinya sendiri. Salah satu tanggung jawab yang dilakukan adalah melalui kebijakan dividen yang baik supaya meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Ida dan Ayu, 2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Dari penjelasan diatas, peneliti ingin menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial di suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga tingkat kebijakan dividen.

H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen

Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Kebijakan Dividen. Pemegang saham dari kalangan publik memiliki karakteristik dengan tujuan investasi dan menginginkan pengembalian atas investasi mereka. Tetapi kepentingan pemegang saham publik seringkali diabaikan karena adanya persepsi bahwa yang paling berjasa memperbesar keuangan perusahaan adalah pemegang saham mayoritas dan diperkuat dengan prinsip *one share one vote* yang dianut dalam hukum perseroan terbatas sehingga dalam setiap RUPS, pemegang saham minoritas seperti publik tidak akan pernah memenangkan keputusan yang diambil melalui voting (Prihartini dkk, 2018).

Publik merupakan salah satu pihak berasal dari luar perusahaan (masyarakat umum) yang bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. Ketika publik telah memilih untuk menempatkan dana ke dalam suatu perusahaan, maka artinya publik telah percaya terhadap pengelola perusahaan tersebut dan pengelola juga harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan publik.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Prihartini dkk, 2018) menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian dari (Ida dan Ayu, 2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap kebijakan dividen.

Dari penjelasan diatas, peneliti ingin menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan publik di suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga tingkat kebijakan dividen.

H3 : Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap Kebijakan Dividen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2020 yang berjumlah 57 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini diseleksi dan dipilih menggunakan kriteria-kriteria yang berdasarkan metode *Purposive Sampling*. Berikut jumlah sampel penelitian setelah dipilih berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan :

Statistik Deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran khusus dan pemahaman mengenai karakteristik dari suatu data. Dalam penelitian ini, statistik deskriptif memberikan data berupa nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi.

Berdasarkan hasil Statistik Deskriptif, jumlah seluruh data penelitian adalah 39 data yang merupakan jumlah laporan tahunan dari 13 perusahaan selama 3 tahun dimulai dari tahun 2018 hingga 2020 yang memenuhi kriteria sampel. Hasil statistik deskriptif untuk variabel Kepemilikan Institusional diukur melalui jumlah kepemilikan dari institusional terhadap suatu perusahaan, yang memiliki angka terendah sebesar 0,5494 atau 54,94 persen berasal dari jumlah kepemilikan institusional pada Bank Central Asia Tbk. tahun 2018. Untuk angka tertinggi adalah berada pada tingkat 0,9742 atau 97,42 persen yang merupakan jumlah kepemilikan institusional pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2018. Nilai rata-rata dari variabel kepemilikan institusional adalah 0,7792 atau 77,92 persen dengan standar deviasi 0,1462 atau 14,62 persen, yang menunjukkan bahwa adanya selisih yang cukup jauh antara nilai terendah ke nilai rata-rata dan tertinggi.

Dengan nilai rata-rata kepemilikan institusional sebesar 77,92 persen, menunjukkan bahwa institusional adalah pihak yang berperan sebagai pengendali pada mayoritas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena memiliki saham yang lebih dari 50% (lima puluh persen), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Hasil Statistik Deskriptif untuk variabel Kepemilikan Manajerial yang diukur melalui jumlah kepemilikan direksi dan komisaris terhadap suatu perusahaan memiliki angka terendah sebesar 0,0001 atau 0,01 persen berasal dari jumlah kepemilikan manajerial pada Bank Danamon Indonesia Tbk. tahun 2019. Kemudian untuk angka tertinggi adalah sebesar 0,0411 atau 4,11 persen yang berasal dari jumlah kepemilikan manajerial pada Bank Maspion Indonesia Tbk. tahun 2018. Nilai rata-rata dari variabel kepemilikan manajerial adalah 0,0052 atau 0,52 persen, dengan standar deviasi 0,0114 atau 1,14 persen. Dari hasil ini terlihat adanya selisih yang cukup jauh antara nilai terendah ke nilai rata-rata dan nilai tertinggi.

Dengan nilai rata-rata kepemilikan manajerial sebesar 0,52 persen, menunjukkan bahwa pihak manajerial tidak berperan sebagai pengendali maupun sebagai pemegang saham utama pada mayoritas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena jumlah kepemilikan saham manajerial tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) untuk menjadi pengendali dan lebih kecil dari 20% (dua puluh persen) untuk menjadi pemegang saham utama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Pihak manajerial perusahaan bisa memiliki saham dari perusahaan dikarenakan adanya pelaksanaan program kepemilikan saham oleh direksi dan dewan komisaris yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka kompensasi kepada direksi dan dewan komisaris sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Hasil Statistik Deskriptif untuk variabel Kepemilikan Publik yang diukur melalui jumlah kepemilikan publik atau masyarakat terhadap suatu perusahaan memiliki angka terendah sebesar 0,0220 atau 2,20 persen yang berasal dari jumlah kepemilikan publik pada Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2018. Kemudian untuk angka tertinggi adalah sebesar 0,4487 atau 44,87 persen yang berasal dari jumlah kepemilikan publik pada Bank Central Asia Tbk. tahun 2020. Nilai rata-rata dari variabel kepemilikan publik adalah 0,2140 atau 21,40 persen dengan standar deviasi 0,1485 atau 14,85 persen. Terlihat bahwa jarak dari nilai rata-rata ke nilai tertinggi tidak terlalu jauh.

Dengan nilai rata-rata kepemilikan publik sebesar 21,40 persen, menunjukkan bahwa mayoritas pihak publik atau masyarakat umum tidak berperan sebagai pengendali perusahaan, tetapi berperan sebagai pemegang saham utama perusahaan karena jumlah kepemilikan yang tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) namun lebih dari 20% (dua puluh persen), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Hasil Statistik Deskriptif untuk variabel dependen, Kebijakan Dividen yang diukur menggunakan DPR (*Dividend Payout Ratio*) yang diterapkan perusahaan memiliki angka terendah sebesar 0,0131 atau 1,31 persen, berasal dari Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tahun 2020. Kemudian untuk angka tertinggi adalah sebesar 0,6550 atau 65,50 persen yang berasal dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2020. Nilai rata-rata dari variabel kebijakan dividen adalah 0,3708 atau 37,08 persen dengan standar deviasi 0,1753 atau 17,53 persen. Dari hasil ini terlihat jika selisih antara nilai rata-rata dengan nilai tertinggi tidak terlalu jauh.

Dengan nilai rata-rata kebijakan dividen sebesar 37,08 persen, menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah membagikan dividen cukup banyak

dikarenakan kinerja yang bagus dan loyal kepada investor sehingga dapat dipercaya oleh investor.

Untuk menguji apakah model regresi antara variabel independen dan dependen berdistribusi normal atau tidak, peneliti melakukan uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi sebesar 5% yang artinya toleransi kesalahan sebesar 5% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki tingkat signifikansi $>5\%$ atau >0.05 .

Berdasarkan hasil Uji Normalitas Data, setiap variabel memiliki nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang kurang dari 0,05. Nilai ini mengindikasikan bahwa data dalam penelitian berdistribusi tidak normal. Untuk mengatasinya, peneliti melakukan pengujian normalitas residual.

Berdasarkan Hasil Uji Normalitas Residual, nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* residual adalah 0,075 lebih besar dari 0,05. Dari nilai ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi, peneliti melakukan pengujian multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 untuk memastikan bahwa data tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Berdasarkan Hasil Uji Multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa terjadi korelasi diantara variabel independen, terlihat dari nilai Tolerance variabel Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Publik yang lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF dari kedua variabel ini juga lebih dari 10. Sehingga untuk mengobati gejala multikolinearitas, peneliti melakukan transformasi data dengan cara akar kuadrat (square root / SQRT).

Berdasarkan Hasil Uji Multikolinearitas Setelah Transformasi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen setelah dilakukan transformasi, terlihat dari nilai Tolerance setiap variabel yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

Untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, peneliti melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Glejser. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan Hasil Uji Heteroskedastisitas, semua variabel independen memiliki nilai sig. lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini atau berarti juga bahwa varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain bersifat tetap.

Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya, peneliti melakukan uji autokorelasi. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test).

Berdasarkan Hasil Uji Autokorelasi, ditunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson adalah 0,752 yang termasuk pada rentang -2 sampai +2 yang artinya tidak terdapat autokorelasi pada data dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji F, dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 2,910 dengan signifikansi 0,048. Memiliki arti bahwa model regresi dalam penelitian ini adalah layak dikarenakan nilai signifikansi $0,048 < 0,05$ serta nilai dari F hitung 2,910 lebih besar dari F tabel (5%) yang bernilai 2,85.

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial (terpisah atau sendiri-sendiri) berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai signifikansi 0,447 lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen.

Variabel Kepemilikan Manajerial memiliki nilai signifikansi 0,210 lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan variabel Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. Variabel Kepemilikan Publik memiliki nilai signifikansi 0,632 lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan variabel Kepemilikan Publik tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen.

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan yaitu nilai konstanta sebesar 0,643 memiliki arti jika variabel independen tidak memiliki nilai atau nol, maka nilai Kebijakan Dividen (KD) adalah 0,643. Nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan Institusional (KI) sebesar -0,951 artinya adalah setiap bertambahnya 1 satuan nilai Kepemilikan Institusional maka akan mengurangi nilai Kebijakan Dividen (KD) sebesar 0,951. Begitu pula sebaliknya dan faktor lain dianggap tetap. Nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan Manajerial (KM) sebesar -0,783 yang artinya adalah setiap bertambahnya 1 satuan nilai Kepemilikan Manajerial maka akan mengurangi nilai Kebijakan Dividen (KD) sebesar 0,783 dan begitu pula sebaliknya serta faktor lain dianggap tetap. Nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan Publik (KP) sebesar 0,643 artinya adalah setiap bertambahnya 1 satuan nilai Kepemilikan Publik maka akan meningkatkan nilai Kebijakan Dividen (KD) sebesar 0,643. Begitu juga sebaliknya dan faktor lain dianggap tetap.

Berdasarkan hasil nilai Adjusted R Square sebesar 0,131 yang memiliki arti bahwa variabel independen Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Publik mampu menjelaskan dan memberikan pengaruh terhadap variabel dependen Kebijakan Dividen sebesar 13,1% sedangkan sisanya 86,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Dari hasil pengujian variabel independen secara terpisah, ditunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak.

Para pemegang saham institusional dalam perusahaan Perbankan yang diteliti pada penelitian ini tidak terfokus pada pengendalian kebijakan dividen dalam perusahaan yang dimilikinya. Kurangnya pengawasan kinerja manajemen perusahaan oleh para pemegang saham institusional sehingga tidak hati-hati dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida dan Ayu (2017) yang menyatakan bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan saham oleh institusi dalam struktur kepemilikan perusahaan perusahaan perbankan di Indonesia tidak berpengaruh pada jumlah dividen yang dibagikan. Tidak signifikannya pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen dalam penelitian ini diduga karena investor institusional memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan investor umum. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian dari Dewi Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen.

Dari hasil pengujian variabel independen secara terpisah, ditunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak.

Kepemilikan manajerial dapat meminimalisir adanya masalah keagenan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham. Namun, dalam hal ini proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen juga harus dipertimbangkan.

Jika manajemen memiliki proporsi kepemilikan saham yang terlalu besar, maka akan berdampak buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan proporsi kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Sehingga, kewenangan manajemen dalam pengambilan keputusan pembagian dividen harus dibatasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frisma Oktavia Khariunnisa (2017). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian dari Silaban dan Pengestuti (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen.

Dari hasil pengujian variabel independen secara terpisah, ditunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Publik tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik memiliki karakteristik dengan tujuan investasi. Pemegang saham publik menginginkan pengembalian atas investasi mereka dan menginginkan pembayaran dividen yang tinggi tanpa memperhatikan perusahaan akan tetap beroperasi atau tidak dimasa yang akan datang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihartini,dkk (2018). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dari Ida dan Sunandar (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh

terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Variabel Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020. Variabel Kepemilikan Publik tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran berupa penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel independen lain yang diduga mampu memberikan pengaruh terhadap variabel dependen agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada investor mengenai perusahaan yang memberikan keputusan Kebijakan *Dividend Payout Ratio*, sehingga investor dapat melakukan penilaian terhadap perusahaan yang dipilih untuk berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adytya, B. 2020. *Dividen Adalah Pembagian Laba Pada Pemegang Saham, Ini Jenis dan Cara Perhitungannya*. <https://www.merdeka.com/trending/dividen-adalah-pembagian-laba-pada-pemegang-saham-ini-jenis-dan-cara-perhitungannya-kl.html?page=1>.
- Akbar, A. 2021. *Apa Itu Investasi? Ini Pengertian, Manfaat, dan Panduannya*. <https://lifepal.co.id/media/apa-dan-bagaimana-cara-berinvestasi/>.
- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Management Control System*. Edisi 11. Penerjemah: F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Penerbit Salemba Empat, Buku 2, Jakarta.
- Dewata, E., Sari, Y., & Fithri, J. E. 2015. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional. *Sari et Al*, 30(3), 175–182.
- Fajarwati, D. 2020. *Teori Keagenan (Agency Theory) - Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/dita180599/5fc61ce18ede481026544212/teori-keagenan-agency-theory>.
- Farida, I., & Sunandar, S. 1970. Pengaruh Cash Ratio, Growth, Debt To Equity Ratio Dan Kepemilikan Publik Terhadap Dividend Payout Ratio Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v14i2.46>.
- Fuad, H. 2021. *OJK Blak-blakan soal Kondisi Perbankan di Indonesia* : <https://economy.okezone.com/read/2021/05/02/320/2404283/ojk-blak-blakan-soal-kondisi-perbankan-di-indonesia>.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate - Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi 9*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handaru, A., & Mardiyati, U. 2014. Jurnal Dinamika Manajemen. *Jdm*, 5(2), 171- 182.

- Harjito, D.A dan Martono. 2014. Manajemen Keuangan. Edisi Kedua. Yogyakarta: EKONOSIA.
- Jayanti, I. S. D., & Puspitasari, A. F. 2019. Ownership Structures and Dividend Policy in Manufacturing Companies in Indonesia. *The International Journal of Applied Business*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.20473/tjab.v1.i1.2017.1-13>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Khairunnisa Oktavia, F. 2017. *PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN PUBLIK, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN. E-Jurnal Akuntansi STIE Perbanas*.
- Nurhaliza, S. 2021. *Sudah Tahu Jenis-Jenis Dividen? Berikut Penjelasan Lengkapnya. https://www.idxchannel.com/economics/sudah-tahu-jenis-jenis-dividen-berikut-penjelasan-lengkapnya*.
- Nurul Ulya, F. 2020. *Bank-bank BUMN Bagikan Dividen, Mana Paling Besar? HalamanallKompas.com.https://money.kompas.com/read/2020/02/21/064400726/bank-bank-bumn-bagikan-dividen-mana-paling-besar?page=all*.
- PRS. 2020. *Tugas dan Kewajiban Perangkat Perseroan Terbatas – Menurut Hukum.https://menuruthukum.com/2020/02/01/tugas-dan-kewajiban-perangkat-perseroan-terbatas/*.
- Putu, N., Mona, S., Agung, A., & Suarjaya, G. 2015. *PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN. E-Journal*, 4(11), 3766–3795.
- Rahayu, D., & Rusliati, E. 2019. Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 41–47. <https://doi.org/10.23969/jrak.v11i1.1870>.
- Rahayu, P., Makhdalena, & Riadi, R. 2015. *The Effect Of Institutional Ownership And Public Ownership On Dividend Policy (Study In Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange For The Period 2012-2015 Manufacturing Sector). Jom Fkip*, 5(1), 1–14.
- Riadi, M. 2018. *Teori, Jenis dan Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen - KajianPustaka.com. https://www.kajianpustaka.com/2018/11/teori-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi-kebijakan-dividen.html*.
- Riadi, M. 2019. Struktur Kepemilikan (Institusional, Manajerial dan Publik). Terbit 12 Desember 2019. (<https://www.kajianpustaka.com/2019/12/struktur-kepemilikan-institusional-manajerial-dan-publik.html>).
- Richard, M. 2021. *Modal Kokoh, Rasio Dividen Bank BUMN Diramal Tak Banyak-Berubah-Finansial-Bisnis.com*.

- <https://finansial.bisnis.com/read/20210114/90/1342858/modal-kokoh-rasio-dividen-bank-bumn-diramal-tak-banyak-berubah>.
- Roos, N. M., & Manalu, E. stefany. 2019. Pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kesempatan investasi terhadap kebijakan dividen dengan likuiditas sebagai variabel moderasi. *Journal of Accounting and Business Studies*, 4(1), 24–39.
- Sairin. 2018. Analisis Pengaruh Kepemilikan Publik, Kepemilikan Asing Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Madani*, 1(2), 325–340.
- Sari, N. K. A. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Kepemilikan Managerial, Kepemilikan Institusional, Free Cash Flow Dan Profitabilitas Pada Kebijakan Dividen. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2439–2466.
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Septiadi, A. 2019. *Bank besar royal bagi-bagi dividen*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-besar-loyal-bagi-bagi-dividen>.
- Shakespeare, W. 2014. *Dividend Policy. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Soenarso Adji, S. 2021. *Bank Negara Indonesia (BBNI) bagi dividen Rp 820,1 miliar, begini rekomendasi analisis*. <https://investasi.kontan.co.id/news/bank-negara-indonesia-bbni-bagi-dividen-rp-8201-miliar-begini-rekomendasi-analisis>.
- Sutrisno. 2003. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Tjahjadi, H., & Tjakrawala, F. K. 2020. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Publik, dan Kepemilikan Asing terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(April), 736–743.
- Waraditya Nugraha, D. 2021. Laba Turun, Bank Tetap Bagikan Dividen. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/03/29/laba-turun-bank-tetap-bagikan-dividen/?status=sukses_login&status_login=login&isVerified=false.
- Widianingsih, D. 2018. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, serta Komite Audit pada Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Moderating dan Firm Size sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 38. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.196>.
- Wijayanti, Ngestiana. 2009. Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, dan Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan.